

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU LAMPUNG: PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

**BANDAR LAMPUNG, 10 September 2025** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPP) merupakan tanggung jawab bersama seluruh penyelenggara dan masyarakat. Proses ini menjadi pondasi penting untuk memastikan hak pilih warga negara tetap terjaga, serta menjamin keakuratan data pemilih dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui kampanye edukatif bertajuk “PDPP adalah Tanggung Jawab Bersama”, Bawaslu Lampung mengajak masyarakat untuk memahami secara menyeluruh bagaimana mekanisme PDPP dijalankan secara berjenjang dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Edukasi ini dilakukan untuk memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi proses pembaruan data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, pelaksanaan PDPP dilakukan secara bertingkat oleh KPU mulai dari pusat hingga daerah.

Di tingkat nasional, KPU RI memiliki peran strategis dalam :

1. Merancang kebijakan dan program PDPP,
2. Melakukan konsolidasi dan rekapitulasi data pemilih nasional,
3. Melaksanakan koordinasi lintas instansi, serta
4. Menjamin perlindungan dan kerahasiaan data pribadi pemilih.



Selain itu, KPU RI bertanggung jawab melakukan pembinaan, supervisi, serta menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu dan pengaduan masyarakat.

Di tingkat provinsi, KPU Provinsi Lampung bertugas menjabarkan kebijakan PDPP nasional, melakukan rekapitulasi dan pemantauan di wilayah provinsi, serta mengoordinasikan instansi terkait di tingkat daerah. KPU Provinsi juga wajib memastikan bahwa data pribadi pemilih terlindungi dan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu.

Sementara itu, KPU Kabupaten/Kota menjadi pelaksana teknis PDPP di tingkat lokal. Mereka memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan pengelolaan data pribadi, menyusun laporan berkala ke tingkat provinsi, serta menindaklanjuti laporan masyarakat dan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu menekankan bahwa kerja berjenjang ini harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akurasi, dan akuntabilitas untuk memastikan data pemilih yang digunakan benar-benar valid.

Bawaslu Provinsi Lampung terus mendorong agar seluruh jajaran penyelenggara pemilu mengedepankan keterbukaan informasi dan kerja sama lintas lembaga. Melalui koordinasi yang intensif antara KPU dan Bawaslu di berbagai tingkatan, diharapkan potensi permasalahan seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau kehilangan hak pilih dapat diminimalisir sejak dini.

Selain dengan KPU, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen penting dalam pengawasan PDPP. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan kejanggalan data pemilih di lingkungan sekitarnya, seperti pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili, atau belum terdaftar dalam daftar pemilih.

“Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan proses menjaga kualitas demokrasi dari hulunya. Data pemilih yang akurat akan memastikan setiap warga negara mendapat hak konstitusionalnya, dan



tidak ada yang kehilangan suara karena kesalahan data,” ujar Iskardo P. Panggar, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung.

Ia menambahkan bahwa tanggung jawab PDPP tidak bisa dibebankan hanya kepada KPU, melainkan harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat.

“Bawaslu akan terus mengawasi jalannya PDPP secara berjenjang, memastikan semua proses dilakukan sesuai regulasi, dan menjamin perlindungan data pribadi pemilih. Mari kita awasi bersama agar demokrasi di Lampung tetap bermartabat dan berintegritas,” pungkasnya.

Melalui upaya pengawasan berkelanjutan, Bawaslu Provinsi Lampung berharap kualitas data pemilih terus meningkat dan dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, serta inklusif.

Gerakan #AyoAwasiBersama bukan hanya slogan, tetapi panggilan nyata agar setiap lapisan masyarakat turut aktif menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung  
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



[bawaslulampung](#)